Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Berbasis Kearifan Lokal di Maluku: Perspektif dan Prospektif

Wuri Handoko

Isu pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) sebagai modal pembangunan masih garapan kalangan terbatas. Berbeda halnya dengan isu lingkungan. Gerakan lingkungan telah menjelma sebagai keuatan transformasi karena dukungan partisipasi publik yang luas. Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan menjadi konsep yang banyak dikembangkan oleh negara-negara dunia ketiga. Padahal embrio gerakan lingkungan hampir bersamaan dengan isu sumberdaya arkeologi. Di wilayah Maluku, mengenal praktek keraifan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan yang dikenal sebagai Sasi. Dalam pengelolaan BCB, praktek mensakralkan BCB sebagai benda pusaka adalah bentuk kearifan lokal. Selain itu praktek keraifan lokal dalam pengelolaan lingkungan sesungguhnya dapat disisipkan isu tentang BCB, karena sumberdaya arkeologi juga bagian dari sumberdaya alam.

Pendahuluan

Para penggiat lingkungan sejak lama, telah memulai gerakan kampanye pengelolaan lingkungan yang melibatkan peran serta masyarakat. Berbagai gerakan advokasi baik dalam bentuk kampanye, penyadaran publik, bahkan upaya litigasi untuk mendudukkan masyarakat sejajar dengan pemerintah dan swasta sebagai subyek pengelola lingkungan, baik sektor kehutanan, pertambangan maupun sektor lingkungan lainnya menjadi agenda utama para aktivis lingkungan.

Di Indonesia embrio gerakan itu juga telah lahir sejak era tahun 1990an, bahkan mungkin lebih lama lagi. Namun baru pada masa reformasi gerakan itu semakin nyata dan gencar dilakukan. Pada masa pasca reformasi semakin giat berbagai gerakan advokasi masyarakat dan lingkungan digelar oleh berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di seluruh Nusantara. Hasilnya, berbagai kebijakan pemerintah menyangkut pengelolaan hutan dan lingkungan berubah, sistem Hak

Penguasaan Hutan (HPH) yang dimonopoli oleh pengusaha dihapus, kemudian diganti dengan sistem IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dimana pada prinsipnya masyarakat, melalui kelompok tani diberi porsi sama rata dengan pihak swasta. Selain itu masih ditambah dengan berbagai persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk bisa memperoleh ijin tersebut. Pendek kata, gerakan lingkungan dan advokasi masyarakat, sedikit banyak telah mempengaruhi pemerintah dalam soal kebijakan publik dalam hal pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.

Dalam gerakan advokasi lingkungan dan sumberdaya alam itu, yang paling penting adalah ketika isu pengelolaan lingkungan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek utama. Semakin meruncing lagi, saat perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan pemerintah terhadap hak-hak adat atau hak ulayat mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Seiring dengan itu, di sektor kehutanan lahir berbagai ide, gagasan, wacana dan gerakan para aktifis untuk keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan seperti Sistem Hutan Kerakyatan (SHK), Perhutanan Komunitas, Kehutanan Masyarakat dan sejenisnya yang merupakan sebuah gerakan perjuangan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pijakan dasar munculnya gerakan advokasi lingkungan dan masyarakat salah satunya adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat atas hak-haknya. Tentang perjuangan terhadap pengakuan hak-hak adat atau ulayat, bahkan hukum-hukum adat yang mengatur dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah karena keyakinan bahwa masyarakat adat memiliki kearifan tradisional yang terkandung pada sistem pranata budaya masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam demi manfaat dan kelestariannya.

Uraian diatas adalah sekelumit informasi, bagaimana gerakan lingkungan telah lama memperjuangkan hak-hak tradisional masyarakat dalam pengelolaan lingkungan atas dasar kearifan tradisionalnya.

Sementara itu, sumberdaya arkeologi (SDA) yang kemudian dipersamakan dengan Benda Cagar Budaya (BCB) merupakan potensi yang baru akan mengambil posisi dalam pembangunan di Indonesia. Isu-isu sumberdaya arkeologi sampai sejauh ini masih menjadi garapan kalangan terbatas. Meski sesungguhnya seperti yang dituliskan Tanudirjo (2004) pengelolaan sumberdaya arkeologi adalah hasil suatu refleksi perjalanan panjang kinerja arkeologi hingga dasawarsa 1970-an (Tanudirjo, 2004: 3). Namun tampaknya di Indonesia, konsep pengelolaan sumberdaya

arkeologi, merupakan isu yang baru-baru saja mulai digarap. Mahmud (2000) menuliskan dibandingkan gerakan lingkungan, kondisi arkeologi sangat menyedihkan, sampai saat ini upaya penyelamatan dan pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) belum mampu membentuk partisipasi sosial secara luas sebagaimana dihasilkan oleh gerakan lingkungan (Mahmud, 2000:89). Dengan kasus seperti itu, maka berbagai upaya partisipasi sosial yang mendudukkan masyarakat sejajar dengan pemerintah perlu terus dikampanyekan. Di masa depan, tentu kita berharap lahirnya kondisi ideal dimana pengelolaan sumberdaya arkeologi menjadi tugas kolektif seluruh elemen bangsa ini. Pada titik ini, masyarakat dengan berbagai kearifan lokalnya menjadi pihak atau subyek yang berperan penting didalamnya.

Perlakuan Masyarakat terhadap BCB: Sebuah Perspektif tentang Kearifan Lokal

Seorang Antropolog Indoensia, Heddy Sri Ahimsa Putra menyebut kearifan lokal sebagai kearifan tradisional. Ia mengartikan “kearifan” sebagai perangkat pengetahuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan atau kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar. Alasannya bahwa pengetahuan terdiri dari berbagai unsur dan membentuk suatu kesatuan; sedangkan kata “tradisional”, diartikannya sebagai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan diterima oleh umum. Pengertian tradisional ini, diambil dari definisi “tradisi” yaitu sejumlah kepercayaan atau praktek yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak melalui tulisan (biasanya secara lisan atau lewat contoh tindakan) yang diterima oleh suatu masyarakat atau komunitas, sehingga menjadi mapan dan mempunyai kekuatan seperti hukum. Selanjutnya kearifan lokal kemudian diartikan sebagai kebijaksanaan atau pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam rangka mengelola lingkungan yang implikasinya adalah kelestarian dan kelangsungan lingkungan untuk jangka panjang.

Berdasarkan atas berbagai makna dari kata arif, tradisi dan tradisional di atas, kita dapat mendefenisikan kearifan tradisional (lokal) sebagai seperangkat pengetahuan yang dimiliki suatu masyarakat yang biasanya diperoleh dari pengalaman langsung hidupnya atau belajar dari pengalaman masyarakat lain untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan dan kesulitan yang dihadapi, serta diperoleh dari generasi-generasi sebelumnya secara lisan maupun melalui contoh

tindakan. Misalnya ketika nelayan berlayar, kemudian mengurungkan niat berlayarnya karena melihat gumpalan awan hitam di ujung garis cakrawala lautan; karena hal itu pertanda akan ada badai di lautan

Pelajaran berharga akan banyak diperoleh dari pengalaman dan kebijaksanaan masa lalu. Masyarakat lokal sebagai komunitas yang paling banyak menjadi pihak pelestari tradisi, memiliki kearifan tradisional karena masih mempertahankan hidupnya tradisi leluhur dalam pranata sosial budaya di lingkungannya. Dalam banyak hal, konsep kearifan tradisional (lokal) telah banyak dianut dalam bidang pengelolaan lingkungan. Di Maluku, mengenal istilah *sasi*, yakni peraturan adat dalam mengelola sektor lingkungan tertentu, yang tujuannya untuk pemanfaatan berbasis pelestarian yang berdasarkan ketentuan-ketentuan adat, misalnya ketentuan panen atau memetik hasil sebuah tanaman produktif yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Sasi juga dipahami sebagai konsep dan perilaku masyarakat tradisional yang dapat memberikan perlindungan bagi kelanjutan preservasi kelangsungan lingkungan atau perawatan yang berkelanjutan pada lingkungan.

Sementara itu pada sektor sumberdaya arkeologi, hingga saat ini di Maluku belum pernah sekalipun dilakukan penelitian khusus terhadap praktek pengelolaan sumberdaya arkeologi oleh masyarakat setempat dimana ditemukan benda arkeologi maupun situs. Belum pula dilakukan studi untuk mengkaji berbagai model kearifan tradisional masyarakat dalam mengelola sumberdaya arkeologi. Sebelum terlalu jauh, hingga saat ini memang masyarakat tak mengenal hak praktek pengelolaan sumberdaya arkeologi oleh masyarakat. Hal ini memang belum ada aturan baku yang secara jelas diketahui masyarakat terhadap haknya untuk mengelola sumberdaya arkeologi di wilayah bermukimnya. Yang ada sementara ini adalah *perlakuan* masyarakat terhadap sumberdaya arkeologi yang ada di wilayahnya. Dari berbagai hasil penelitian arkeologi, kerap kali ditemui berbagai praktek perlakuan masyarakat terhadap BCB.

Sebagai contoh misalnya perlakuan masyarakat dalam sebuah komunitas tertentu di Maluku terhadap piring-piring tua porcelain yang diperlakukan sebagai benda pusaka. Sebagai benda pusaka, maka dilestarikan dan dijaga secara turun temurun sebagai salah satu identitas dan jati diri sebuah kelompok masyarakat. Adakalanya pula, keberadaan benda warisan budaya atau yang sekarang kita kenal sebagai BCB oleh masyarakat disimpan atau dilestarikan sebagai penanda atau simbolisasi kepemimpinan oleh marga

tertentu. Contoh dalam kasus ini, dapat diangkat misalnya sepasang meriam tipe nusantara yang dianggap sebagai simbol kepemimpinan marga tertentu di negeri Elpaputih, Pulau Seram. Demikian juga, di wilayah bekas Kerajaan Sahulau, sampai saat ini masih tersimpan hulu tongkat berbahan kuningan, yang dipercaya sebagai simbol kepemimpinan Sultan Sahulau. Meskipun secara kuantitas sangat terbatas, praktek ini sesungguhnya menggambarkan bentuk sikap masyarakat terhadap pentingnya melestarikan BCB. Tentu masih banyak lagi bentuk perlakuan lainnya.

Pengelolaan BCB sesungguhnya tak bisa dipisahkan dari masyarakat. Hal ini karena sumberdaya arkeologi baik situs maupun tinggalan arkeologi pada umumnya ditemukan justru di sekitar wilayah hunian masyarakat. Bahkan sebagian besar sumberdaya arkeologi ditemukan di lingkup wilayah masyarakat yang terkecil seperti dusun dan desa. Sumberdaya arkeologi tersebut tak jarang masih memiliki korelasi dengan sejarah dan budaya masyarakat setempat yang masih memiliki ciri lokal atau mempertahankan tradisi dan norma-norma adat yang diwarisi dari leluhurnya. Masyarakat atau komunitas justru dan lebih mengetahui keberadaan sumberdaya arkeologi tersebut, sebelum kehadiran peneliti arkeologi. Selain itu masyarakat juga mengetahui latar belakang keberadaan sumberdaya arkeologi yang ada berdasarkan pengetahuannya. Maka, tak jarang masyarakat sangat mensakralkan sumberdaya arkeologi tersebut. Selain karena masih berhubungan dengan sejarah dan budaya leluhurnya, juga mereka percaya bahwa BCB itu diwariskan oleh para leluhurnya (Handoko, 2006). Dalam persepektif yang sama, Mahmud (2000) menuliskan, pada masa lalu gagasan tentang benda warisan budaya tumbuh dalam proses sakralisasi. Masyarakat menempatkan warisan budayanya dengan sangat terhormat (Mahmud, 2000:84). Dengan demikian masyarakat sesungguhnya memiliki perspektif dalam mengelola BCB secara arif.

Disadari, hingga saat ini kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan sumberdaya budaya dan arkeologi masih sangat kurang. Namun di tempat lain masih banyak pula dijumpai kelompok masyarakat yang sangat mensakralkan sumberdaya budaya/arkeologi disekitar huniannya. Ini berarti kesadaran untuk memelihara dan melestarikan sumberdaya tersebut masih ada. Yang terpenting bagaimana kemudian hal itu didorong menjadi sebuah kesadaran kolektif seluruh masyarakat (Handoko, 2007:133). Di Maluku, perspektif kearifan lokal sesungguhnya

masih hidup, mengingat pada hampir seluruh desa di Maluku sekarang ini masih banyak komunitas masyarakat memegang teguh pranata adat warisan leluhur. Dengan perspektif demikian, sesungguhnya masyarakat secara arif turut melestarikan BCB. Tentu berikutnya, berpeluang dikembangkan menjadi sebuah konsep bersama pengelolaan BCB berbasis kearifan lokal itu.

Prospek Pengelolaan BCB berbasis Kearifan Lokal

Sesungguhnya negara telah membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta mengelola aset negara yang diperuntukkan bagi kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Negara juga mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui pranata hukum negara yang melindungi hak-hak rakyat. Dengan demikian, tersedia ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk turut serta berkontribusi dalam mengelola sumberdaya yang ada. Sejalan dengan itu, maka berbagai konsep pengelolaan yang hidup di masyarakat dapat disinergikan dengan berbagai aturan hukum negara yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya bagi pembangunan. Meskipun sejauh ini, dalam berbagai prakteknya, konsep yang lahir dari masyarakat seringkali lemah dan dikalahkan oleh kekuatan negara atau dengan kata lain cenderung dipinggirkan, jika tidak menguntungkan negara secara menyeluruh. UU Tentang perlindungan BCB yakni UU No.5 Tahun 1995 beserta Peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu, sesungguhnya telah mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan BCB, namun dalam pelaksanaannya tidak banyak dipraktekkan. Dengan demikian tampaknya basis sosial perlu diciptakan untuk mendukung pendekatan hukum yang selama ini menjadi benteng pertama dan terakhir BCB (Mahmud, 2000:90).

Dalam soal pengelolaan sumberdaya arkeologi, aspek sosiologis menjadi tumpuan bagi pelaksanaannya dan menjadi anutan yang banyak dipedomani. Atmosudiro (2004) menjelaskan antara lain :

- Pengelolaan SDA perlu sinergi baik internal maupun eksternal
- Perlindungan, pelestarian SDA bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat
- Penerapan manajemen SDA yang berdaya guna sehingga SDA dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas, tumbuh rasa memiliki dari generasi ke generasi.

Pada prinsipnya pengelolaan sumberdaya arkeologi ditujukan

untuk kepentingan sosial masyarakat. Fowler (1982) menjelaskan pengelolaan sumberdaya arkeologi merupakan penerapan kemampuan pengelolaan (merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan evaluasi) untuk mencapai tujuan pelestarian dengan melalui proses politis untuk melestarikan aspek-aspek penting dari warisan budaya kita untuk kepentingan masyarakat (Fowler, 1982 dalam Tanudirjo, 2004: 2). Di Indonesia, praktek demikian dapat diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya arkeologi merupakan sebuah perubahan kebijakan dari pemerintah yang dilalui melalui proses politik untuk melestarikan sumberdaya tersebut dengan pertimbangan sosiologis yakni kepentingan masyarakat. Aspek sosiologis lainnya yang sangat penting yakni pengelolaan sumberdaya arkeologi untuk kepentingan jangka panjang, yakni pembangunan berkelanjutan, diantaranya untuk kepentingan generasi yang akan datang (ibid).

Pelestarian BCB tentu tak bisa dipisahkan dengan konteks lingkungan dimana BCB tersebut berada. Dengan demikian, pelestarian lingkungan pada suatu situs atau BCB berada, sekaligus melestarikan sumberdaya arkeologi yang ada pada lingkungan tersebut. Industrialisasi, modernisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dari pariwisata. Dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan memerlukan pembukaan kawasan atau daerah, kadang-kadang ada juga gangguan terhadap lingkungan dan pelestarian tinggalan arkeologi (Sutaba 1991 : 21). Dampak apapun yang ditimbulkan oleh perkembangan pariwisata budaya terutama terhadap obyek-obyek yang memiliki tinggalan arkeologi (BCB), perlu kiranya mendapat perhatian yang serius. Berbagai usaha dapat dilakukan yang sebelumnya tentu perlu dikaji dengan cermat dengan tidak hanya melibatkan para perencana yang terbiasa dengan alasan dalam perencanaan, tetapi mengajak kaum praktisi yang mungkin mempunyai pengalaman langsung di lapangan, para ahli arkeologi dan unsur-unsur masyarakat (Desa Adat). Desa adat dalam hal ini memegang kunci terhadap pelestarian tinggalan arkeologi beserta lingkungannya (Bagus, 2005).

Keterikatan historis antara masa lalu dengan saat ini tampaknya dapat dirangkai kembali melalui upaya ini, sehingga hubungan primordial BCB dan masyarakat tidak terputus. Upaya yang penting terus digalakkan adalah berbagai bentuk penelitian terhadap sumberdaya arkeologi yang melibatkan peran serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk pendugaan nilai penting BCB sebagai bahan atau informasi untuk pendidikan dan penyadaran publik serta mendekatkan jarak historis dengan masyarakat. Diharapkan munculnya

kesadaran kolektif masyarakat terhadap sejarah dan budayanya, sehingga timbul rasa memiliki yang kuat terhadap keberadaan BCB sebagai media pemantapan identitas sosial masyarakat.

Penyadaran lingkungan dan penyadaran budaya, sesungguhnya merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Hal ini karena budaya tumbuh dan hidup dalam konteks keberlangsungan sebuah lingkungan. Budaya masyarakat tidak terlepas dari proses adaptasi terhadap lingkungan. Maka, tidak salah jika kemudian muncul penilaian yakni kerusakan lingkungan akibat eksploitasi lingkungan yang berlebihan juga berakibat munculnya degradasi budaya akibat “*amnesia budaya*” di masyarakat (Geria, 2005:1). Artinya masyarakat jarang mau memahami kondisi sekarang dalam konteks sejarah. Padahal masyarakat masa lampau dalam mengelola lingkungan alam dengan kearifan yang dimiliki sudah mempertimbangkan pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainable*). Oleh karenanya, kearifan masa lalu ini perlu digali dan dikaji terus sebagai bahan informasi untuk dapat memandang kondisi sekarang dalam konteks sejarahnya, serta memahami bahwa kondisi alam sekarang harus dikelola sustainable untuk bisa dinikmati di masa yang akan datang. Memetik pelajaran sejarah dan budaya masa lalu, dapat melahirkan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lingkungan dan BCB yang ada.

Dengan cara pandang demikian, sesungguhnya merupakan prospek yang kuat lahirnya gerakan arkeologi yang setaraf dengan gerakan lingkungan. Isu-isu tentang pelestarian lingkungan dapat disisipi dengan isu penyelamatan BCB. Hal ini karena konteks BCB yang tak bisa dipisahkan dengan lingkungan dimana BCB tersebut berada. Dengan demikian berbagai kearifan lokal menyangkut upaya pelestarian lingkungan juga dapat menjadi konsep dalam pengelolaan BCB, dengan berbagai pengembangan dan penyesuaian konteks persoalan yang dihadapi.

Penutup

Isu gerakan arkeologi yang bertujuan untuk pelestarian sumberdaya arkeologi serta pemberdayaan masyarakat sebagai subyek yang sejajar dengan pemerintah dan kalangan swasta sesungguhnya dapat disejajarkan dengan gerakan lingkungan. Namun di Indoensia, gerakan arkeologi tampaknya masih sangat lemah. Hal ini selain masih menjadi pembicaraan kalangan terbatas, juga belum munculnya perspektif yang sama terutama dari pihak masyarakat sendiri. Di satu sisi banyak masyarakat yang berperan dalam

berbagai kerusakan Benda Cagar Budaya (BCB), namun disisi lain masih banyak pula komunitas masyarakat yang begitu mensakralkan BCB yang ada. Oleh karena itu, upaya mendorong kesadaran kolektif masyarakat penting di galakkan.

Dalam pengelolaan BCB, negara sesungguhnya telah memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat penuh dan bergerak secara aktif sesuai energi yang dimiliki. Namun seringkali dalam prakteknya masih sangat lemah, dan kadang cenderung menafikkan peran serta masyarakat. Yang paling penting karenanya, bagaimana membangun kekuatan sosial masyarakat untuk berperan penuh dalam pengelolaan BCB. Kesadaran kolektif bisa dibangun jika ada perspektif yang sama dari masyarakat tentang keberadaan BCB. Oleh karenanya upaya mendekatkan jarak historis melalui berbagai upaya penelitian, pendidikan, kampanye penyadaran publik sangat penting digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi dari masyarakat terhadap BCB.

Upaya mendekatkan jarak historis bermuara pada semakin kuat lahirnya berbagai rumusan tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan BCB. Di Maluku, berbagai konsep kearifan lokal dalam mengelola lingkungan telah menjadi pranata budaya yang diakui secara kolektif. Hal ini dapat menjadi modal untuk pengembangan konsep kearifan lokal dalam pengelolaan BCB. Keberadaan BCB tak dapat dipisahkan dengan konteks lingkungan dimana BCB itu berada. Dengan demikian isu pelestarian BCB dapat disisipkan ke dalam isu pelestarian lingkungan. Berbagai pranata adat tentang pelestarian lingkungan yang sarat dengan konsep kearifan lingkungan dapat dikembangkan sebagai konsep kearifan lokal dalam pengelolaan BCB. Yang terpenting lagi, bagi masyarakat lokal Maluku, yang masih banyak menghormati pranata adat yang diwariskan leluhurnya, termasuk mensakralkan berbagai benda pusaka budaya, maka berbagai kearifan lokal di dalamnya merupakan prospek kuat bagi upaya pengelolaan BCB di wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Atmosudiro, Sumiyati, 2004 *Manajemen Sumberdaya Arkeologi dan Kendala Penerapannya*. Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta. Disampaikan dalam Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Tingkat Dasar di Trowulan.
- Bagus, A.A Gde 2005 *Manajemen Sumberdaya arkeologi Dalam Pembangunan Pariwisata. Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA X)*. Yogyakarta
- Geria, I Made 2005 *Kajian Arkeologi Lanskap Tantangan Ke depan dalam Pelestarian Warisan Budaya di Bali. Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA X)*. Yogyakarta
- Handoko, Wuri 2007 *Sumberdaya Arkeologi Menuju Industri Pariwisata di Maluku: Masalah, Peluang, Tantangan dan Solusi. Kapata Arkeologi*. Edisi Khusus. Balai Arkeologi Ambon
- Mahmud, Irfan M, 2000 *Agenda Sosiologis Pelestarian Benda Cagar Budaya. Majalah Kebudayaan*. Nomor 18 Tahun IX 1999/2000. Departemen Pendidikan Nasional.
- Tanudirjo, Daud Aris, 2004 *Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi : Sebuah Pengantar*. Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta. Bahan Diskusi untuk Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Trowulan.
-, 2006 *Pengantar Pengelolaan Sumberdaya Budaya*. Jurusan Arkeologi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.